

Tol Medan-Binjai Segera Dikonstruksi

JAKARTA – PT Utama Karya menargetkan pemancangan tiang perdana (*ground breaking*) pembangunan ruas tol Medan-Binjai dapat dilakukan pada semester I-2013. Investasi pembangunan tol sepanjang 16,8 kilometer ini ditaksir mencapai Rp 4 triliun.

“Ruas tol trans Sumatera yang mungkin untuk *groundbreaking* tol Medan-Binjai. Sedangkan ruas lainnya masih kami pertajam yakni tol Palembang-Indralaya, Babakan-Jati Agung, dan Batam,” ujar Sekretaris Perusahaan PT Utama Karya Ari Widianoro di Jakarta, Kamis (4/4).

Namun begitu, sambung dia, rencana ini dapat direalisasikan apabila peraturan presiden (*perpres*) penugasan pembangunan tol trans Sumatera sudah terbit. Peraturan ini sebagai payung hukum pengerjaan tol trans Sumatera ini. “Kami masih tunggu itu,” tambah Ari.

Pemerintah masih menyelesaikan *perpres* ini sambil merevisi Peraturan Pemerintah No 15/2005 tentang Jalan Tol. Draf revisi PP Jalan Tol saat ini sudah berada di Sekretariat Kabinet dan nantinya akan diharmonisasikan

di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum diteken Presiden.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak sebelumnya mengakui, pemerintah tengah meram-pungkan revisi peraturan pemerintah itu, termasuk di dalamnya peraturan presiden tentang penugasan terhadap Utama Karya sebagai wakil pemerintah untuk membangun tol trans Sumatera.

Adanya revisi PP dan *perpresnya*, maka pemerintah memastikan akan segera membangun jalan tol Sumatera sepanjang 2.700 kilometer. “Pembangunan akan dilakukan melalui penugasan badan usaha milik negara yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh negara,” kata Hermanto.

Penugasan tersebut, katanya, karena ruas-ruas tol yang direncanakan dibangun tidak menarik bagi investor swasta meski sudah mulai ditender sejak 2005-2008. “Jadi, meski secara ekonomi layak, tetapi secara finansial tidak, maka itu yang tidak menarik swasta. Nah, koridor inilah yang akan ditugaskan kepada BUMN, atas nama pemerintah,” jelas dia.

Ari menambahkan, nilai investasi

pembangunan ruas tol Medan-Binjai ditaksir sebesar Rp 4 triliun yang berasal dari ekuitas internal maupun pendanaan yang diberikan pemerintah. Namun begitu, saat ini badan usaha milik negara ini saat ini juga tengah mengkaji secara tidak resmi mengenai persiapan pembangunan, seperti studi kelayakan (*feasibility study*), penetapan trase jalan, dan pendataan lahan yang akan digunakan untuk membangun jalan tol.

Pengadaan lahan untuk ruas tol ini nantinya akan menggunakan UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-undang ini dinilai lebih efektif dalam membebaskan lahan karena ada kepastian penyelesaian dalam dua tahun.

Ari melanjutkan, pihaknya belum dapat memperkirakan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan ruas tol Palembang-Indralaya. Kendati demikian, dia memastikan skema umum pembiayaan jalan tol berupa 30% modal internal dan 70% dari perbankan akan dilakukan. “Termasuk dukungan pendanaan dari pemerintah,” katanya. (ean)